

**PENYELESAIAN TINDAK PIDANA RINGAN MELALUI  
*RESTORATIVE JUSTICE*  
(Studi Putusan Pengadilan Negeri Kisaran No. 42/Pid.B/2022/PN Kis)**

**Yayuda Ibnu Asri \***  
**Prof. Dr. Mustamam, M.Ag\*\***  
**Dr. Panca Sarjana Putra, SH.MH\*\***

**ABSTRAK**

Tindak pidana ringan akhir-akhir ini menarik perhatian publik karena penanganannya dianggap tidak lagi proporsional dengan tingkat keseriusan tindak pidana yang diatur. Rumusan masalah penelitian dalam tesis ini adalah bagaimana pengaturan hukum tentang alternatif penyelesaian restoratif justice dalam tindak pidana ringan, bagaimana eksistensi *restoratif justice* dalam menyelesaikan tindak pidana ringan, bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 42/Pid.B/2022/PN Kis

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum yuridis normatif dan yuridis kasus dengan pendekatan konseptual dan perundang-undangan dengan menggunakan data primer dan didukung dengan data sekunder berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Pengaturan penyelesaian tindak pidana ringan dalam proses peradilan pidana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP dan sebagai tindak lanjut dari PERMA telah dibentuk Nota Kesepakatan Bersama Nomor 131/KMA/SKB/X/2012, Nomor M.HH.-07.HM.03.02 Tahun 2012; Nomor :KEP-06/E/EJP/10/2012; Nomor:B/39/X/2012, Rabu, tanggal 17 Oktober 2012 tentang Pelaksanaan Penerapan Penyusunan Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda, Acara Pemeriksaan Cepat, serta Penerapan Keadilan Restoratif (*Restoratif Justice*). Penyelesaian tindak pidana ringan dalam proses peradilan pidana perspektif Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2012 belum menjamin ditegakannya untuk memenuhi rasa keadilan dalam hukum.

Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa pertimbangan hukum hakim Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 42/Pid.B/2022/PN Kis yang memerintahkan terdakwa dibebaskan dari tahanan sudah tepat sebab Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan melanggar Pasal 362 KUHP yang didalam dakwaan tersebut Terdakwa didakwa dengan tindak pidana pencurian rokok sebanyak 6 (enam) slop rokok dengan berbagai merk, namun didalam uraian dakwaan Penuntut Umum tersebut Penuntut Umum tidak menjelaskan atau menguraikan secara detail atau rinci rokok apa saja yang telah diambil oleh Terdakwa dan berapa harga dari setiap rokok yang diambil oleh Terdakwa tersebut.

**Kata Kunci: Putusan, Peradilan, Pidana Ringan**

---

\* Mahasiswa Program Ilmu Hukum Universitas Islam Sumatera Utara.

\*\* Dosen Pembimbing I dan II Program Ilmu Hukum Universitas Islam Sumatera Utara.

**SETTLEMENT OF MINOR CRIME THROUGH  
RESTORATIVE JUSTICE)**  
**(Study of Kisaran District Court Decision No. 42/Pid.B/2022/PN Kis)**

**Yayuda Ibnu Asri \***  
**Prof. Dr. Mustamam, M.Ag\*\***  
**Dr. Panca Sarjana Putra, SH.MH\*\***

**ABSTRACT**

*Minor crimes have recently attracted public attention because their handling is no longer proportional to the seriousness of the criminal offenses being regulated. The formulation of the research problem in this thesis is how the legal regulations regarding alternative solutions for restorative justice in minor crimes, what is the existence of restorative justice in resolving minor crimes, what are the legal considerations of judges in the Kisaran District Court Decision Number 42/Pid.B/2022/PN Kis*

*The research carried out is normative juridical and case juridical research with a conceptual and statutory approach using primary data and supported by secondary data in the form of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials..*

*Arrangements for resolving minor crimes in the criminal justice process are regulated in the Republic of Indonesia Supreme Court Regulation Number 2 of 2012 concerning Adjustments to the Limits of Minor Crimes and the Amount of Fines in the Criminal Code and as a follow-up to the PERMA, a Joint Memorandum of Agreement Number 131/KMA/SKB/X/ has been formed. 2012, Number M.HH.-07.HM.03.02 of 2012; Number: KEP-06/E/EJP/10/2012; Number: B / 39 / Resolving minor crimes in the criminal justice process from the perspective of Republic of Indonesia Supreme Court Regulation Number 2 of 2012 does not guarantee that they will be enforced to fulfill a sense of justice in the law.*

*Based on the research results, it is understood that the legal consideration of the judge at Kisaran District Court Number 42/Pid.B/2022/PN Kis who ordered the defendant to be released from detention was correct because the defendant was charged by the public prosecutor with violating Article 362 of the Criminal Code, in which the defendant was charged with a criminal offense. The theft of 6 (six) slops of cigarettes with various brands, however, in the description of the Public Prosecutor's indictment, the Public Prosecutor did not explain or describe in detail what cigarettes had been taken by the Defendant and how much each cigarette the Defendant had taken.*

*Keywords: Decision, Trial, Light Crime*

*\*Students of the Law Studies Program at the Islamic University of North Sumatra.*

*\*\*Supervisor I and II of the Legal Studies Program at the Islamic University of North Sumatra*